

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP KINERJA KEUANGAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN DAN
KOTA PROVINSI MALUKU UTARA 2014-2018)

Akbar Abdul Gafar¹
Universitas Islam Indonesia
Akbarabdulgafar91@gmail.com
Dekar Urumsah²
Universitas Islam Indonesia
Dekar.urumsah@uii.ac.id

ABSTRAK

Otonomi daerah belum sepenuhnya menghasilkan kewenangan daerah mengelola sumber daya alam dan potensi-potensi penerimaan daerah itu sendiri, Artinya masih terjadi ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat untuk mendanai keberlangsungan desentralisasi yang ada di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, terhadap kinerja keuangan serta dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Maluku utara Periode 2014-2018. Teknik pengambilan sampel yang menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 10 kabupaten dan 2 kota. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dan pertumbuhan ekonomi, variabel kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

Regional autonomy have not fully produce local authority managing natural resources and potentials local income itself, It means still happens dependence fiscal from the central government to fund sustainability decentralization that is at the. This study aims to to analyze the influence of local revenue, public allocation fund, On the performance of the impact it had on financial and economic growth. The population in this research consisting of 8 districts and 2 townships in provinces north maluku 2014-2018 period. The technique of the sample collection who uses a method of purposive the sampling method of that produces samples from 10 of the approximately districts and 2 the city. Types of data on which it had collected is taken from secondary data. The method of analysis data using statistical analysis descriptive. multiple linear regression analysis. This research result indicates that, local revenue, General allocation fund impact on financial performance and, economic growth, Financial performance variables have had a positive impact on economic growth

Keywords: Local revenue, general allocation funds, financial performance, economic growth.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam kebijakan yang dirancang pemerintah pusat dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang diserahkan pemerintah daerah dalam hal mengurus masyarakat dan administrasi pembangunan di daerah sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No.32 tahun 2004. Kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya UU Nomor 32/2004. Pelaksanaan kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang juga mengacu pada UU Nomor 25/1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari otonomi daerah ini untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah berdasarkan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah Astuti (2015). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yang lain adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan nasional dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi (Barimbing dan Karmini 2015).

Terlaksananya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tergantung kinerja pemerintah daerah dan pemanfaatan keuangan daerah. Mahmudi (2010) menyatakan kinerja rasio keuangan dapat digunakan dalam mengukur suatu pencapaian perkembangan kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. makin baik pengelolaan keuangan daerah makin baik pula pencapaian yang akan di raih oleh pemerintah daerah. Adanya otonomi daerah ini kewenangan di berikan oleh daerah untuk memanfaatkan sumber daya alam nya dan potensi daerahnya yang lain melalui pendapatan asli daerah. Saraswati (2017) menyatakan optimalisasi potensi keuangan dipandang penting bagi pemerintah daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD), dikarenakan terdapat peluang untuk menggali perbagi potensi pendapatan lokal.

Dana alokasi umum (DAU) yang di transfer dari pusat ke daerah dalam hal ini menstarakan keuangan antara daerah yang memiliki fiskal yang rendah. Oleh karena itu, dana alokasi umum seharusnya dipergunakan sebaik mungkin oleh pemerintah

daerah dalam hal penganggaran belanja untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana demi kemajuan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Machmud dan Radjak (2018) menyatakan dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan penelitian dari Setiyawati dan Hamzah (2007), Maryati dan Endrawati (2010), Saraswati (2017), dan Saraswati (2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada penelitian oleh Talangamin dan Kindangen (2018) dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun tidak signifikan. Variabel pendapatan asli daerah yang merupakan penelitian dari Saraswati dan Rioni (2019) dan Wenny (2012) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun hasil penelitian oleh Machmud dan Radjak (2018) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Variabel dana alokasi umum yang merupakan penelitian dari Machmud dan Radjak (2018) memperoleh hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. Variabel dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan penelitian dari Setiyawati dan Hamzah (2007); Putra dan Budiasih, (2017) menemukan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian Mawarni dan Darwais (2013); Dewi dan Suputra, (2017) dan Nisa (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel kinerja keuangan yang merupakan penelitian dari Kindangen dan Rotinsulu (2019); Astuti (2015) dan Prihastutis dkk (2015) memperoleh kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi berbeda dengan penelitian Kindangen dan Rotinsulu (2019) yang menemukan hasil bahwa kinerja keuangan daerah dengan Rasio ketergantungan tidak pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa 1) mampu memberikan kontribusi secara khusus untuk menggambarkan kondisi tentang pengelolaan keuangan dan potensi daerah. 2) memberikan masukan kepada Pemerintah

daerah upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan kinerja keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

RERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Contohnya keagenan dalam pemerintahan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal (Fozzard, 2001; Moe 1984). Antara eksekutif dan legislatif sering terjadi perselisihan dalam menentukan kebijakan, ketika mengambil suatu keputusan keagenan. Maka dari itu, asumsi yang dilakukan oleh Lupia dan McCubbins (1994) menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi legislatif dapat diartikan sebagai fenomena yang disebut *agency problems*.

Pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan otonomi daerah. Menurut Saragih (2003) suatu wilayah yang terdapat kenaikan pertumbuhan ekonomi positif kemungkinan adanya peningkatan PAD yang merupakan salah satu akses yang baik terhadap PDRB. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Azis (2016), Utama dan Ismawati (2018), Dewi dan Suputra, (2017), Rori dan Luntungan, (2016), Maryati dan Endrawati (2010) dan Harahap (2018) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan

Dengan tujuan terwujudnya desentralisasi maka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia. Astuti (2015), kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian hasil kerja dibidang keuangan meliputi anggaran dan realisasinya dengan indikator keuangan sesuai dengan perundangan dalam periode anggaran. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Junarwati dan Basri, (2013), Saraswati dan Rioni, (2019), Wenny, (2012), Darwanis dan Saputra, (2014) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₂: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi umum melalui APBN yang di anggarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan ketentuan undang-undang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah demi terlaksananya otonomi daerah Saraswati (2017). Adanya dana alokasi umum ini diharapkan pemerintah daerah benar-benar memanfaatkan untuk kebetuhan dianggarkan sesuai dengan keberlangsungan desentralisasi yang di jalankan oleh pemerintah daerah dan memenuhi semua keinginan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Mawarni dan Darwanis, (2013), Talangamin, Paulus dan Kindangen, (2018), Dewi dan Suputra, (2017), Nisa, (2017), Maryati dan Endrawati (2010) bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dianggarkan dengan tujuan pemerataan keuangan terhadap daerah yang memiliki fiscal rendah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (PP No.55/2005). Dalam hal perancangan penyusunan anggaran, anggaran yang diajukan oleh eksekutif terdapat ketidakberpihakan terhadap masyarakat tetapi memiliki muatan kepentingan pribadi eksekutif Smith dan Bertozzi (1998). Halnya dengan penelitian Machmud dan Radjak (2018) memperoleh hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₄: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

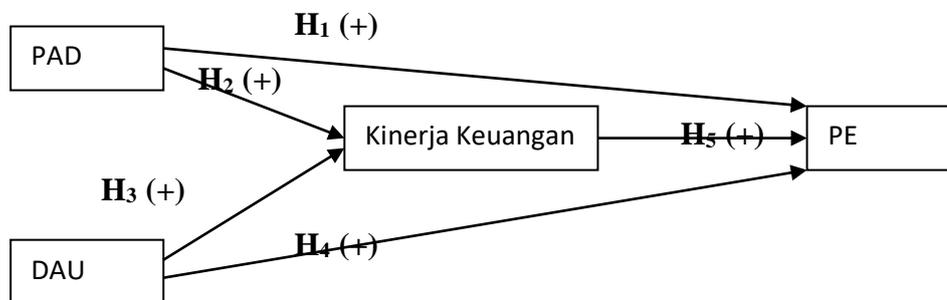
Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi

Astuti (2015), kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian hasil kerja dibidang keuangan meliputi anggaran dan realisasinya dengan indikator keuangan sesuai dengan perundangan dalam periode anggaran. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan melakukan analisis rasio keuangan daerah terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kinerja keuangan dipergunakan untuk mengukur suatu keberhasilan atau pencapaian pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, terwujudnya peningkatan pertumbuhan daerah tergantung dari pemaanfaatan pendapatan asli daerah dan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tolak ukur rasio penerimaan dan

pengeluaran pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Astuti (2015), Prihastuti dkk (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₅: Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi



Gambar 1
Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018. Dalam penelitian ini menggunakan pemerintahan daerah Maluku Utara dikarenakan pemerintah daerah sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, sehingga dapat mengetahui sejauh mana pengaruh keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Metode Pengambilan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan kriteria-kriteriatertentu. Berikut Kriteria-Kriteria tersebut adalah: a) terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu. dua kota dalam penelitian ini yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. b) Laporan keuangan yang disajikan pada tahun 2014-2018. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informasi laporan keuangan tahunan pemerintah daerah Maluku Utara selama periode penelitian, yang didokumentasikan dalam situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). www.bps.go.id

Variabel Dependen

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan perkapita dengan Produk domestik regional bruto (PDRB), salah satu pengukuran yang berdasarkan total nilai barang dan

jasa yang ada di daerah. maka dari itu makin tinggi pertumbuhan ekonomi pemerintah akan memperbaiki peningkatan kualitas pelayanan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut (Dewi dan Suputra, 2017).

Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB(t) - PDRB(t-1)}{PDRB(t-1)} \times 100\%$$

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. PAD diukur dari total penjumlahan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (Dewi dan Suputra, 2017).

Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membiayai kebutuhan dan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Maka adanya dana alokasi umum pemerintah daerah bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengelolaan sumberdaya alam di daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Dewi dan Suputra, 2017).

Maka dari itu dana alokasi umum dapat di hitung berdasarkan rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{Realisasi Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan mengukur Rasio efisiensi yang menggambarkan cerminan kemampuan dan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah. (Agustina, 2012).

Maka dari itu Kinerja keuangan dapat dihitung berdasarkan rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dianggarkan untuk penerimaan pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran suatu data mengenai mean (rata-rata), median (nilai tengah), maximum, minimum, dan standar deviasi pada variabel Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan kinerja keuangan. Pengujian hipotesis ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$M = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 M + e_2$$

Keterangan :

- Y = Variabel Pertumbuhan Ekonomi
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Alokasi Umum
- M = Kinerja Keuangan
- Bo = Konstanta
- β₁-β₂.β₃ = Koefisien regresi
- e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014-2018 dan ada total 8 kabupaten dan 2 kota yang dijadikan sampel sehingga total data yang dianalisis sebanyak 50 pengamatan.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel: 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	50	.0090	.2192	.056818	.0450703
DAU	50	.4237	.9016	.647772	.0978309
Kinerja_Keu	50	.0140	6.9660	1.373360	1.4371160
Pertumb_Ek	50	.0328	.3072	.129926	.0580032
Valid N (listwise)	50				

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), median, dan (*standar deviation*) dari sampel penelitian.

Uji Normalitas

Tabel: 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.05101641
	Absolute	.157
Most Extreme Differences	Positive	.157
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		1.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.171

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah berdistribusi secara normal dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar $0,171 > 0,05$. Dengan demikian data-data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel: 3 Uji Multikolinieritas

Variabel			
Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0.844	1.185	Tidak ada multikolinieritas
DAU	0.834	1.199	Tidak ada multikolinieritas
Kinerja_Keu	0.838	1.194	Tidak ada multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, pada variabel independen (PAD, DAU, dan kinerja keuangan) dimana nilai *tolerance*-nya di atas 0,1 dan nilai VIF-nya tidak lebih besar dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel: 4 Uji Heteroskedastisitas

Variabel independen	T hitung	sig	Keterangan
PAD	0.404	0.688	Tidak ada heteroskedastisitas
DAU	0.658	0.514	Tidak ada heteroskedastisitas
Kinerja_Keu	-0.058	0.954	Tidak ada heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, yang ditunjukkan dengan hasil uji Glejser dengan nilai probabilitas di atas 0,05.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan alat statistik Regresi Linier Berganda yang berguna untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, kinerja keuangan dengan variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Analisis regresi tahap I yaitu pengaruh PAD dan DAU terhadap Kinerja Keuangan.

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda I

Variabel	Koefisien regresi	Koefisien Beta	t hitung	Sig-t	Keterangan
(Constant)	-2.405				
PAD (X1)	10.166	0.319	2.316	0.025	Signifikan
DAU (X2)	4.941	0.336	2.443	0.018	Signifikan
Koefisien Determinasi (R ²)	0.162				
F hitung	4.556				
Sig F	0.016				
Dependent Variable : Kinerja Keuangan (M) Sumber: Data diolah, 2019					

Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan (X₁).

Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,316 dan probabilitas sebesar 0,025. Dengan demikian probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,025 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel PAD secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja keuangan.

Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan (X₂).

Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,443 dan probabilitas sebesar 0,018. Dengan demikian probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,018 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pada variabel DAU secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja keuangan. Analisis regresi linier berganda tahap II untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan Kinerja Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6. Hasil Regresi Linier Berganda Model II

Variabel	Koefisien regresi	Koefisien Beta	t hitung	Sig-t	Keterangan
(Constant)	-0.028		-0.486	0.629	
PAD (X1)	0.459	0.357	2.526	0.015	Signifikan
DAU (X2)	0.193	0.326	2.298	0.026	Signifikan
Kinerja_Keu (M)	0.004	0.111	0.783	0.438	Signifikan
Koefisien Determinasi (R ²)	0.226				
F hitung	4.487				
Sig F	0.008				
Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi (Y)					
Sumber : Data Diolah, 2019					

Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (X₁).

Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,526 dan probabilitas sebesar 0,015. Dengan demikian probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,015 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel PAD secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi (X₂).

Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,298 dan probabilitas sebesar 0,026. Dengan demikian probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,026 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pada variabel DAU secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (X₃).

Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,783 dan probabilitas sebesar 0,438. Dengan demikian probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,438 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pada variabel Kinerja keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Tabel 7. Hasil Uji One Sample T

Hipotesis	Deskripsi	T	Sig	Keterangan
H ₁	PAD→PE	2,526	0,015	Signifikan
H ₂	PAD→Kinerja Keuangan	2,316	0,025	Signifikan
H ₃	DAU→PE	2,298	0,026	Signifikan
H ₄	DAU→Kinerja Keuangan	2,443	0,018	Signifikan
H ₅	Kinerja Keuangan→PE	0,783	0,438.	Signifikan

Sumber : Data diolah, 2019

Signifikansi : 5%

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7 maka dapat diketahui variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran bagi pemerintah provinsi di Maluku Utara. 1) Gubernur, Walikota dan Bupati yang ada di Maluku Utara lebih meningkatkan PAD lebih maksimal lagi. 2) anggaran keuangan pemerintah daerah benar-benar di alokasikan pada sektor-sektor yang potensial.

Implikasi

Pemerintah daerah selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi yaitu dengan pembinaan, dan ekstensifikasi yaitu dengan penggalan potensi, karena Pendapatan Asli Daerah adalah penentu kemandirian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., dan Syukriy A. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Adi, A., Putra, P., Ayu, I. G., dan Budiasih, N. (2017). Kinerja Keuangan Daerah Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1436–1462.
- Adyatma, E., dan Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Agustina, O, A. (2012). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Keuangan*, 5(11), 1-25.
- Ani, N., dan Dwirandra, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(3), 481–497.
- Anwar, S. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardhansyah, P. H. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serdang. *Jurnal Bisnis*, 1(1), 1–13.
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*, 6(1), 1–18.
- Aulia, A. N. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 203–214.
- Bodman, P., Kelly, A. H., dan Andrew, H. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian model Averaging Approach*. MRG@UQ Discussion Paper, School of Economics, University of Queensland.

- Boediono, (1985). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE
- BPS, Provinsi Maluku Utara (2018). *Tingkat kemiskinan Maluku Utara*.
- _____. Provinsi Maluku Utara (2018). *Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara*.
- Cheris, E. K., Amran, T., dan Naukoko, A. T. L. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di era Otonomi Daerah: Studi pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Chindy, F. R., Antonius, Y., dan Luntungan, A. O. N. (2016). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013*. 16(02), 243–254.
- Christensen, J. G. (1992). Hierarchical and contractual approaches to budgetary reform. *Journal of Theoretical Politics* 4(1): 67-91.
- Colombatto, E. (2001). Discretionary power, rent-seeking and corruption. University di Torino & ICER, *working paper*.
- Darwanis, D., dan Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199.
- Dwi, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 8(2), 54–68.
- Dwi, S. dan Yunita, S. R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Dwi, S. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 44–55.
- Fozzard, A. (2001). The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper*.1(1), 1-52
- Gan, W, C. (2005). *“Intergovernmental Fiscal Transfer System a New Model From a Comparason Between Sweden and China”*. Kristianstad university.
- Ghozali, (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hagen, V. dan Jurgen. (2002). Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social Review* 33(3): 263-284.
- _____. (2003). Budgeting institutions and public spending, in Shah, Anwar (ed.). 2003. *Handbook on Public Sector Performance Reviews. Volume 1: Ensuring*

- Accountability When There Is No Bottom Line*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Havid, S. Y. E. R. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2), 109–124.
- Hygi, P. A., Taufik, T., dan Agusti, R. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Sorot*, 10(2), 143-154.
- I Nyoman, S. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 86–98.
- Jens, C., Andvig, O. H., Fjeldstad, A. S. (2001). Corruption: Critical assessments of contemporary research. In *Working Paper - Chr. Michelsen Institute*. 17(1), 1-33.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). 305-360.
- Junarwati, H., dan Basri, S. A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 186–193.
- Karmini, Y. R. B. N. L. (2015). Pengaruh pad, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(5), 434–450.
- Kuncoro. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lane, J. E. (2000). *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- _____. (2003). *Management and public organization: The principal-agent framework*. University of Geneva and National University of Singapore. *Working paper*.
- Linawati, M., dan Solikah, B. Z. (2018). Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Kediri. *Majalah Ekonomi*, 23(1), 60–71.
- Lupia, A. dan McCubbins, M. (1994). Who controls? Information and the structure of legislative decision making. *Legislative Studies Quarterly* 19(3), 361-384.
- _____. 2000. Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291-307.
- Machmud, J., dan Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32.

- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi kedua. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mawarni, D. S. A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 80–90.
- Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. *American Journal of Political Science* 28 (5), 739-777.
- Modebe, N.J., Regina, G., Okafor, J.U.J., Onwumere, dan Imo, G. I. (2012). Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. *European Journal of Business and Management*, 4 (19), 66-74.
- Mohammad, A. (2016). Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 12(1), 49–63.
- Ni, W. R., dan Dewi, I. D. G. D. S. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1745–1773.
- Olvy, B. T., dan Paulus, K. R. A. M. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1–11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2017. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.*
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Gunawan, R. S. (2005). *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*. Edisi Pertama-Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rarung, P. (2016). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap PDRB Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 449–460.

- Rostow, dan Musgrave. (1996). *Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. Terjemahan oleh Drs. Benyamin Molan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Saragih, dan Panglima, J. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saraswati, I. A., dan Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(1), 662-686.
- Sari, G. N., Kindangen, P., dan Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 18(2), 1–19.
- Sari, I., Agusti, R., dan Rofika. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon*, 3(1), 679–692.
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 103–124.
- Sekaran, (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiyawati, A., dan Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228.
- Smith, R. W., dan Mark, B. (1998). Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* (Fall): 325-353.
- Sriyana, J. (2011). Kesenjangan antara Kebutuhan dan Kapasitas Transfer Fiskal di Indonesia. *Kontribusi Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Dalam Penguatan Perekonomian Bangsa*, (1), 71–98.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. (2000). Metodologi penelitian. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suwandi, K. A., dan Tahar, A. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal Infestasi*, 11(2), 118–136.
- Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7, 356–376.
- Tambunan, T. H. (2006). *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Tambunan, Tulus. (2006). *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*

Taras, T., dan Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.

Ulfi, M., dan Endrawati, S. M. K. A. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 68–84.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang Undang Nomor 28/2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota. *Ilmiah STIE MDP*, 2(1), 39–51.

Wood, L. (1998). Local Government Dollars & Sense, *Quarterly Journal of Economics*, 7(8), 622-738.

www.bps.go.id